



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A1 2A11
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Uang untuk Sumbar Rp31,44 Triliun

PADANG - SINGGALANG

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dana transfer ke Sumbar 2018 mencapai Rp31,44 triliun. Diharapkan penggunaan dana sebanyak itu dapat segera dilaksanakan dengan baik.

"DIPA sudah diterima, langsung susun kegiatan, khususnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga awal tahun bisa langsung lelang. Kalau ada perubahan struktur pada satuan kerja perangkat daerahnya, segera buat surat baru siapa Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Angga-

rannya," ungkap Gubernur Irwan Prayitno usai menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah pada bupati/walikota serta perwakilan instansi vertikal di Sumbar, di Auditorium Gubernur, Kamis (14/12).

Dari data Kementerian Keuangan, DIPA Sumbar Rp10,84 triliun. Angka tersebut disalurkan oleh 725 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga. Jumlah itu naik Rp370 dari DIPA tahun sebelumnya.

Sementara, alokasi transfer daerah dan dana desa sebesar Rp20,604 triliun ke Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten/kota. Jumlah itu turun dari sebelumnya, Rp436

miliar dibanding 2017. Khusus untuk dana desa turun Rp5,75 miliar atau 0,7 persen yang diakibatkan karena perubahan formulasi alokasi dana desa. Dimana porsi pembagian dana desa yang selama ini 90 persen dibagi rata, diturunkan menjadi 77 persen dibagi rata dan 3 persen khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang punya jumlah penduduk miskin terbanyak.

Selain itu penurunan dana transfer juga dikarenakan tidak semua pemerintah daerah di Sumbar mendapatkan dana insentif daerah (DID). Dari 20 pemerintah daerah di Sumbar, terdapat 17 penda yang memperoleh dana DID.

Khusus untuk penerima dana DID kriterianya, pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Kemudian bisa menetapkan APBD tepat waktu. Selain itu kriterianya kemudahan investasi, perencanaan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, SAKIP dan pelayanan publik.

Menurutnya, jika lelang bisa dilakukan dengan cepat, maka realisasi kegiatan bisa terlaksana cepat pula. Hal menjadi harapan Presiden Joko Widodo, supaya anggaran yang digelontorkan ke daerah mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan cepat.

"Khususnya infrastruktur, harus Bersambung ke him A-11

Uang untuk Sumbar ...

cepat tendernya. Jangan sampai selesai tender Mei, pengerjaan Juni, akhirnya tidak tuntas," ulasnya.

Irwan juga berpesan pada bupati/walikota agar tidak menerima apapun alasan keterlambatan pengadaan barang/jasa dari bawahannya. Ini mengingatkan pekerjaan pengadaan sudah menjadi gawe rutin setiap tahun.

"Kalau dicari alasan, seribu bisa didapat. Saya di lingkungan provinsi tidak menerima alasan keterlambatan. Ini kerja rutin sudah puluhan tahun, bisa

diantisipasi kendalanya sejak awal," tegasnya.

Menyikapi penurunan Dana Desa dimaksud, Gubernur Irwan Prayitno menilai, penurunan telah sesuai formulasi dan berlaku seluruh Indonesia. Menurutnya yang terpenting, penggunaan dana desa harus berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

"Dana desa digunakan habis, tapi realisasinya tidak dirasakan masyarakat. Ini yang perlu evaluasi. Saya minta bupati/wali kota benar-benar mendampingi nagari penerima dana ini," pintanya. (104)